



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban Bappelitbangda Kota Kotamobagu terhadap capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2021 beserta realisasinya, yang pada prinsipnya memuat laporan tentang capaian kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021. Yang diarahkan bagi pemenuhan target yang telah ditetapkan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategis penanganan dalam rangka perbaikan capaian kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021.

Kotamobagu, 25 Februari 2022 :

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU'. The inner ring contains 'BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU'. The center contains 'DINAS PERENCANAAN, PERTANAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA'. A signature is written over the stamp.
**KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU**
ADNAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730223 199302 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL.....		iv
DAFTAR GAMBAR.....		v
IKHITISAR EKSSEKUTIF		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tugas, Fungsi	1
	1.3 Struktur Organisasi.....	2
	1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
	1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	9
	2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	9
	2.1.1 Tujuan dan Sasaran Rentra	12
	2.2 Indikator Kinerja Utama	13
	2.3 Perjanjian Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
	3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021	17
	3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	36
	3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA).....	41
	3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	43
	3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
	3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	48
	3.2 Realisasi Anggaran	50
BAB IV	PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel I.1	Aspek Strategis	7
Tabel I.2	Isu-Isu Straregis	8
Tabel II.1	Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Perubahan	10
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu	13
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4	Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan	15
Tabel II.5	Program Pendukung Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021	16
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bapelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021	18
Tabel III.2	Keselarasan Program RPJMD dan RKPD	20
Tabel III.3	Inovasi yang direncanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2021	34
Tabel III.4	Inovasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Tahun 2021	35
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	37
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra	42
Tabel III.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal.
Gambar 1.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu	4
Gambar 1.2	Komposisi ASN yang Menduduki Jabatan (Sampai Dengan Desember 2021)	7
Gambar 1.3	Komposisi ASN menurut Golongan (Sampai Dengan Desember 2021)	8
Gambar 1.4	Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan (Sampai Dengan Desember 2021)	6
Gambar 3.1	Capaian Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	31
Gambar 3.2	Capaian Indikator Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	31
Gambar 3.3	Capaian Indikator Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada OPD	33
Gambar 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	41
Gambar 3.5	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021, merupakan gambaran dari capaian kinerja yang dilaksanakan periode Tahun 2021 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Selanjutnya sesuai Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Bappelitbangda Kota Kotamobagu menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana 2 (dua) Sasaran Strategis merupakan Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) Sasaran Strategis Lainnya merupakan penunjang kegiatan Kesekretariatan, Sasaran Strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda	Presentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	95 %
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Yang Konsisten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95 %
Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	85 %
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	75 %

Sumber Data : Renstra Perubahan Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2019-2023

Tahun 2021 merupakan Tahun Ketiga yang ingin diwujudkan capaian kinerjanya sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Secara umum hasil capaian kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu telah menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan analisis capaian kinerja, gambaran pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021 sebagai berikut :


1. Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah tercapai dengan realisasi 100%.
2. Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan telah tercapai dengan realisasi 100%.
3. Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tercapai dengan realisasi 100%.

Pencapaian kinerja Tahun 2021 tercapai melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dan *Stakeholder* serta didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan keuangan yang cukup.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021 didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dalam wujud kerjasama dan *team work* dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target Kinerja yang telah diperjanjikan telah diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya untuk hasil yang optimal.

Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disusun melalui Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan per Triwulan.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU



ADNAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730223 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran tentang bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pencapaiannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan.

Pembentukan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor

133) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan.
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Pemerintahan
 - Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
 - Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perekonomian
 - Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

- Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu
 Nomor : 33 Tahun 2016
 Tanggal : 28 November 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A



WALIKOTA KOTAMOBAGU

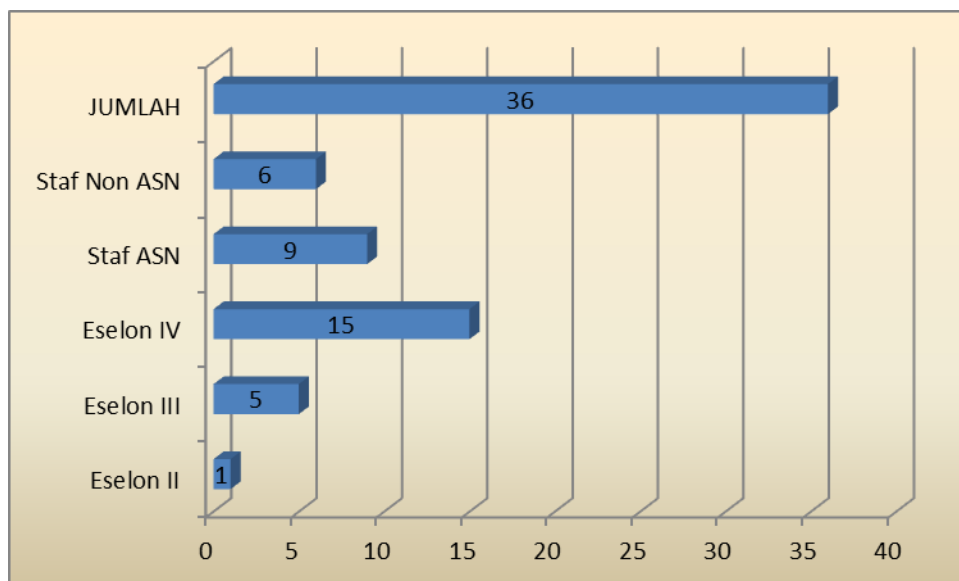
Tatong Bara
 TATONG BARA

1.4 Sumber Daya Manusia

Bappelitbangda Kota Kotamobagu merupakan unit organisasi perencanaan yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta tanggung jawab sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek pembangunan. Pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappelitbangda Kota Kotamobagu dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

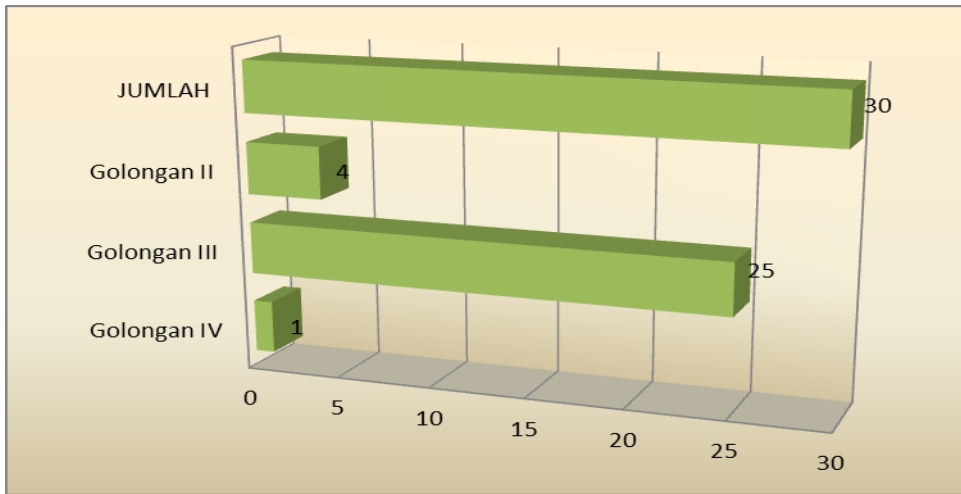
Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai Bappelitbangda Kota Kotamobagu diharapkan memiliki sikap profesional, berintegritas, bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya. Komposisi dan jumlah Aparatur Sipil Negara pada unit kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, menduduki jabatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Komposisi ASN yang Menduduki Jabatan
(Sampai Dengan Desember 2021)



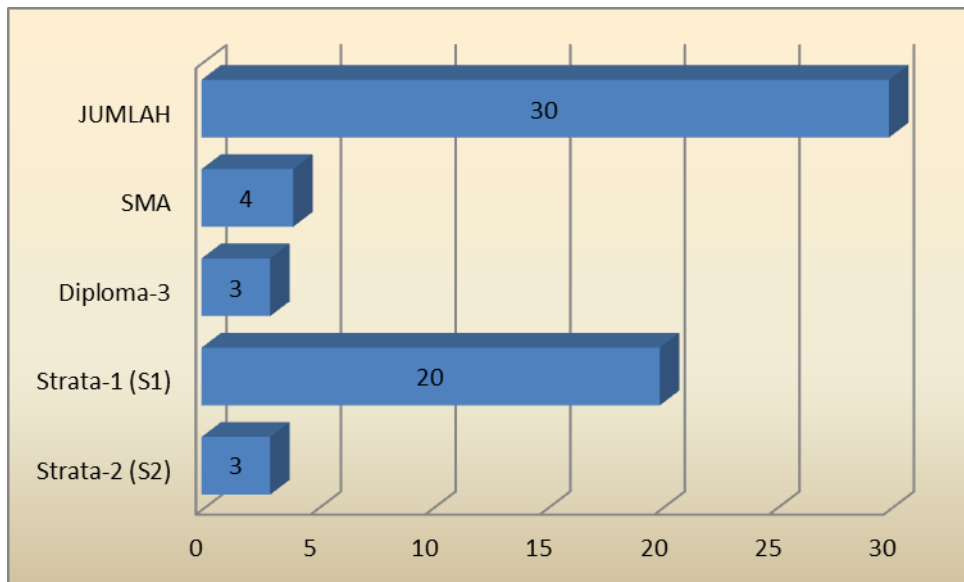
Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 1.3
Komposisi ASN menurut Golongan
(Sampai Dengan Desember 2021)



Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021

Gambar 1.4
Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan
(Sampai Dengan Desember 2021)



Sumber Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021

Berdasarkan deskripsi gambar diatas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping, selain itu jumlah dan rasio personil biasa (pelaksana) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan

rasio lebih kecil namaun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Bappelitbangda Kota Kotamobagu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 10% dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister) sedangkan 66,67% berpendidikan S1 (Sarjana) sedangkan 10% berpendidikan DIII dan 23% berpendidikan Sekolah Menengah. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai bidang dan tugasnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Adapun aspek strategis Bappelitbangda Kota Kotamobagu dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1
Aspek Strategis

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Masih rendahnya kualitas data dukung di bidang perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan data perangkat daerah. - Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya sistem informasi pembangunan daerah (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019) - Ketersediaan lembaga penyelenggara Peningkatan kapasitas.
belum terpenuhi capaian indikator kategori sangat inovatif	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas inovasi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Sumber Data : Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2019-2023

Setelah adanya penentuan aspek strategis Bappelitbangda Kota Kotamobagu, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel I.2
Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis
1	Belum optimalnya kualitas data dukung perencanaan Pembangunan Daerah
2	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif

Sumber Data : Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2019-2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

Rencana Strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis atau Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Jika capaian Renstra Perangkat Daerah melebihi sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi, maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara Nasional / Propinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini memberikan indikasi bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Perubahan RENSTRA tersebut disusun untuk melaksanakan perubahan RPJM Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya

yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan senantiasa melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga setiap dokumen perencanaan dan hasil kajian dapat diterapkan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan sistem inovasi daerah, meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan.

Tabel II.1
Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Perubahan

SEBELUM							SESUDAH						
Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	2021	2022	2023	Target Akhir P-RPJMD
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif1	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan	%	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	%	85	85	85	85
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	%	100	100	100	100		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	%	75	75	75	75
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	persentase kualitas sarana dan	%	100	100	100	100	telah disesuaikan/dihilangkan						

	prasarna aparaturn																		
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan keterseediaan layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100													telah disesuaikan/dihilangkan
Meningkatnya disiplin Aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	100	100	100	100													telah disesuaikan/dihilangkan
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangat daerah	%	100	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	%	95	95	95	95	95					
Mewujudkan Kualitas SDM Aparatur yang Handal	persentase SDM aparaturn yang handal	%	100	100	100	100													telah disesuaikan/dihilangkan
							Meningkatnya Dukungan Kinerja Bappelitbangda	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Sesuai SOP	%	95	95	95	95	95					

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2019-2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Bappelitbangda Kota Kotamobagu pada Tahun 2021 melakukan revisi (perubahan) Renstra, perubahan Renstra ini ada beberapa perubahan pada sasaran, indikator sasaran Renstra sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif, indikator sasaran persentase hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan sasaran dan

indikator ini berupa hasil kelitbangan berupa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Indikator Sasaran Presentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan untuk pencapaian pembangunan. Pencapaian Indikator sasaran ini melalui Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Inovasi yang dihasilkan, baik dari masyarakat umum maupun inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijelaskan dengan sinkronisasi program pada RPJMD dengan Program pada RKPD sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan penyesuaian regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh peningkatan kualitas data dukung dari seluruh entitas dan Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Dukungan Kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu dengan indikator sasaran Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan sesuai SOP dijelaskan administrasi sekretariatan dapat mendukung Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan Bappelitbangda Kota Kotamobagu.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan, Sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dirumuskan berdasarkan Misi Ketiga Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu Meningkatkan *Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.*

Uraian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Yang Konsisten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangda untuk Pencapaian Pembangunan
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sumber Data : Renstra Perubahan Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2019-2023

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN		FORMULA	SATUAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Selaras}}{\text{Jumlah Program}} \times 100\%$ <i>Strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Tahun Berkenan</i>	% (Persentase)
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Hasil Kajian yang direkomendasikan}} \times 100\%$	% (Persentase)
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah}}{\text{Jumlah Inovasi yang direncanakan}} \times 100\%$	% (Persentase)

Sumber Data : SK Penetapan IKU Perubahan Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2021

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum				Sesudah		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100%		Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95%
	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%			Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100%				Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)

Sumber Data : PK Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Penjelasan pada tabel diatas Perjanjian Kinerja Perubahan dalam strategi mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (program, kegiatan, alokasi anggaran). Pengaruh pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan ada penyesuaian regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk mendukung Perjanjian Kinerja, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu

menetapkan 3 (tiga) program pada Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.5
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021

No.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KET
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.151.209.100,00	530.211.500,00	
2.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	640.735.800,00	496.829.800,00	
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	513.292.600,00	433.387.800,00	
	TOTAL	2.305.237.500,00	1.460.429.100,00	

Adapun program-program pendukung tersebut diatas untuk pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan, sedangkan untuk penganggaran Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan mengalami perubahan anggaran dari Rp.2.305.237.500,00 menjadi Rp.1.460.429.100,00. Dari pelaksanaan ketiga program Bappelitbangda Kota Kotamobagu selang waktu Tahun Anggaran 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.844.808.400,00 akibat kebutuhan anggaran penanganan Pandemi Covid-19.

**BAB
III****AKUNTABILITAS
KINERJA****3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 dengan target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu dapat dijabarkan dalam Tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	100	105,26
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	85	100	117,65
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	75	100	133,33

Dari Tabel III.1 di atas dapat dijelaskan penjabaran atas pencapaian dari masing – masing sasaran strategis beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sasaran indikator ini didukung oleh 2 Program yaitu

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Capaian indikator ini diukur dengan formula ***Jumlah program Selaras dibagi Program Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD Tahun berkenan dikalikan 100 %***.

Berdasarkan formula diatas jumlah program selaras berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pada tahun sebelumnya, keselarasan program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan program Perangkat Daerah dengan hasil kualitas perencanaan yang konsisten penyelenggaraan pemerintah akan diterapkan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pada tahun ini sebanyak 156 dan jumlah program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebanyak 156 dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100 %, target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *persentase keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah* adalah 105,26%. Pada Tahun 2021 Bappelitbangda Kota Kotamobagu menyusun Perubahan RPJMD. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci *Outcome* dan *Output*, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Perpres 18 / Tahun 2020 (RPJMN) Tentang Penyelarasan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional. Dengan adanya Perubahan RPJMD, Bappelitbangda Kota Kotamobagu melakukan Pemetaan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil capaian keselarasan program dalam RKPD terhadap RPJMD Tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.2
Keselarasan Program RPJMD Dan RKPD Tahun 2021

NO	RKPD				RPJMD			
	1	1		PENDIDIKAN	1	1		PENDIDIKAN
1	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
4	1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5	1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
6	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
	1	2		KESEHATAN	1	2		KESEHATAN
7	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
9	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				KESEHATAN MASYARAKAT
10	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
11	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
12	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
13	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
15	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
16	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
17	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
18	1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
19	1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
20	1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
21	1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
22	1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
23	1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
24	1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	1	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

25	1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
26	1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
27	1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
28	1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
29	1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
30	2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
31	2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
32	2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
33	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	1	5		PENANGGULANGAN BENCANA	1	5		PENANGGULANGAN BENCANA
34	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
35	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
36	1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
37	1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	1	6		SOSIAL	1	6		SOSIAL
38	1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
39	1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
40	1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

41	1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
42	1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	2	7		TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2	7		TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
43	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
44	2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
45	2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
46	2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
47	3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
48	3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
49	3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	2	8		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	8		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
51	2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
52	2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
53	2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
54	2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
55	2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	2	9		KETAHANAN PANGAN	2	9		KETAHANAN PANGAN
56	2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
57	2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

58	2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
59	2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	2	11		LINGKUNGAN HIDUP	2	11		LINGKUNGAN HIDUP
60	2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
61	2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
62	2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
63	2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
64	2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
65	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66	2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
67	2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
68	2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
69	2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70	2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA
71	2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
72	2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
73	2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN

				LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				MASYARAKAT HUKUM ADAT
	2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
74	2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
75	2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
76	2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	2	15		PERHUBUNGAN	2	15		PERHUBUNGAN
77	2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN	2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN
78	2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
79	2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
80	2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
81	2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	2	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN	2	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN
82	2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
83	2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
84	2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
85	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
86	3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

87	3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
88	3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
89	3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	2	18		PENANAMAN MODAL	2	18		PENANAMAN MODAL
90	2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
91	2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
92	2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
93	2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
94	2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
95	2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
96	2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN
	2	22		KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	22		KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
97	2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
98	2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
99	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
100	2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
101	2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
102	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
103	3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
104	3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN

				PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				EKONOMI KREATIF
	2	23		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	23		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
105	2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
106	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
107	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
108	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
109	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
	3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN	3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN
110	3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
111	3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
112	3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
113	3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
114	3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
115	3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
116	3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	4	1		SEKRETARIAT DAERAH	4	1		SEKRETARIAT DAERAH
117	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
118	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
119	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

120	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
121	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
122	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4	2		SEKRETARIAT DPRD	4	2		SEKRETARIAT DPRD
123	4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	5	1		PERENCANAAN DAN PENNGEMBANGAN DAERAH	5	1		PERENCANAAN DAN PENNGEMBANGAN DAERAH
124	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
125	5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
126	5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	2		KEUANGAN	5	2		KEUANGAN
127	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
128	5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
129	5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5	3		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5	3		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
130	5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
131	5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6	1		INSPEKTORAT DAERAH	6	1		INSPEKTORAT DAERAH
132	6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
133	6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	7	1		KECAMATAN	7	1		KECAMATAN
134	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

135	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
136	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
137	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
138	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
139	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
140	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
141	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
142	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
143	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
144	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
145	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
146	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
147	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
148	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
149	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
150	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

151	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
152	8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
153	8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
154	8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
155	8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
156	8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sumber Data : RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan (RPJMD) pada Tahun 2021 sudah selaras dengan Program RKPD Sehingga dapat terukur dimana Jumlah program RPJMD sama dengan jumlah RKPD tahun 2021 yaitu sejumlah 156 program dengan presentase capaian 105,26%.

Gambar 3.1
Capaian Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dicapai sesuai dengan prioritas.

2. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan didukung oleh 1 Program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pada Tahun 2021, target indikator sasaran hasil kajian kelitbangan untuk pencapaian pembangunan adalah 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 133,33%. Capaian untuk indikator ini dapat digambarkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Capaian Indikator Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan



Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***jumlah hasil kajian kelitbangan yang di tindaklanjuti dibagi dengan jumlah hasil kajian yang direkomendasikan dikalikan 100%***. Pada akhir tahun 2021 jumlah pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebanyak 2 (dua) yaitu:

1. Pelatihan hal ikhwal kopi;
2. Pelatihan UMKM dan Koperasi;

Dari 2 (dua) rekomendasi hasil-hasil kelitbangan tersebut yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) yaitu:

1. Pelatihan hal ikhwal kopi (pembentukan ekosistem inovasi kopi).

Pelatihan hal ikhwal kopi sebagaimana disebutkan di atas, yakni program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan cluster kompetensi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

2. Pelatihan UMKM.

Pelatihan UMKM sebagaimana disebutkan di atas, yakni program pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro oleh Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi Kota Kotamobagu.

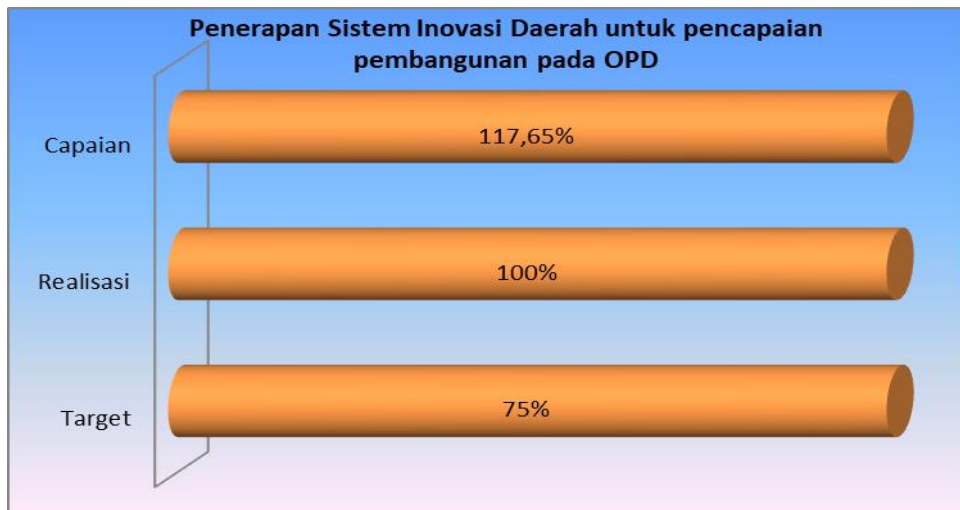
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada. Disamping itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kelitbangan melalui kegiatan Pembinaan Kelitbangan.

3. Untuk sasaran Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase Penerapan Sistem Inovasi

Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didukung oleh 1 Program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pada tahun 2021, target indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah adalah 75% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 117,65%. Indikator capaian ini dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3
Capaian Indikator Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada OPD



Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah Inovasi yang dilaksanakan di OPD dibagi dengan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan dikalikan 100%***.

Hingga Tahun 2021 Jumlah Inovasi yang direncanakan sebanyak 8 Inovasi Daerah yaitu :

1. Simpelkan Cepat (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu;
3. Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;

4. Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu;
5. Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
6. SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
7. SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile);
8. SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);

Tabel III.3

Inovasi yang direncanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu	Simpelkan Cepat (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu	Kinalanag (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan)
3	UPTD Puskesmas Gogagoman	Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kotamobagu	Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu)
5	Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;	Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang
6	Bappelitbangda Kota Kotamobagu	SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Kotamobagu	SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu	SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);

Dari 8 inovasi yang direncanakan tersebut, yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah adalah 8 Inovasi. Inovasi tersebut adalah:

1. Simpelkan Cepatu (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu;
3. Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4. Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu;
5. Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata kluster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
6. SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
7. SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile);
8. SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);

Tabel III.4

Inovasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu	Simpelkan Cepatu (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu	Kinalanag (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan)
3	UPTD Puskesmas Gogagoman	Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kotamobagu	Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu)
5	Desa Poyowa Besar I dan Desa	Pengembangan kawasan

	Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;	pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang
6	Bappelitbangda Kota Kotamobagu	SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Kotamobagu	SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu	SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);

Berdasarkan data tersebut diatas, berdasarkan formula yang ada maka realisasi kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100%.

Dengan target yang ditetapkan sebesar 75 %, maka capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)* adalah 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 diberikan predikat **INOVATIF** (Surat Keputusan Terlampir).

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan senantiasa memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat di jelaskan pada tabel III.5 berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021											
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	95,00	100,00	105,26%
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan	0	0	0	0	0	0	85,00	100,00	117,65%
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	0	0	0	0	0	0	75,00	100,00	133,33%
2020											
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	0	0		100	100,00	100,00%	0	0	0
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	0	0		100	80,00	80,00%	0	0	0

		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	0	0	100	72,20	72,20 %	0	0	0
2019										
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100,00	100,00	100,00%	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100,00	100,00	100,00%	0	0	0	0	0
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100,00	100,00	100,00%	0	0	0	0	0

Sumber Data : LKjIP Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2019 s.d 2021

Dari tabel III.5 diatas dapat dijabarkan perbandingan capaian sasaran dan indikator kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Untuk Tahun 2019 pada sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100% dan pada sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif dengan indikator Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan Untuk Pencapaian Pembangunan, target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%, dan serta pada sasaran meningkatnya kualitas kebijakan

pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif dengan indikator Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah, target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Untuk Tahun 2020 pada sasaran Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%. dan pada sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif dengan indikator Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan, target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 80% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 80%, dan serta pada sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif dengan indikator Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 72,20% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 72,20%.

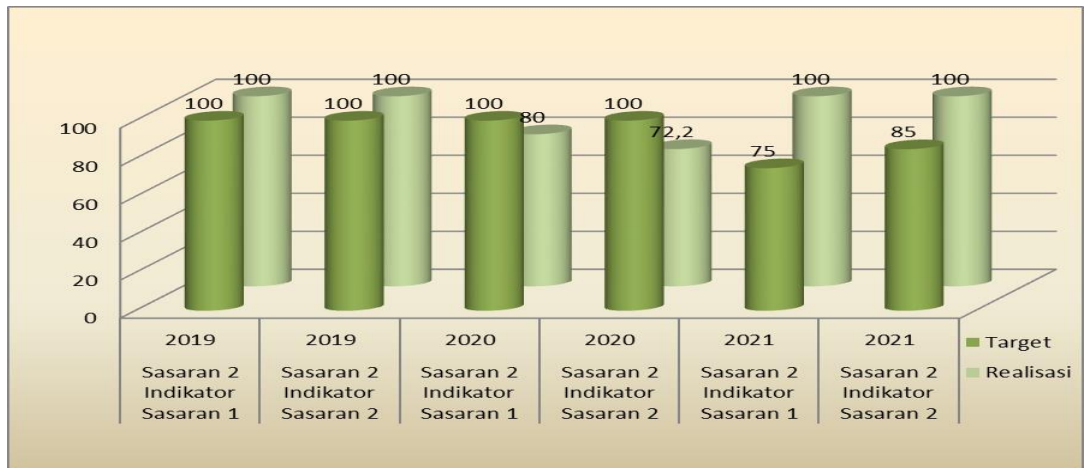
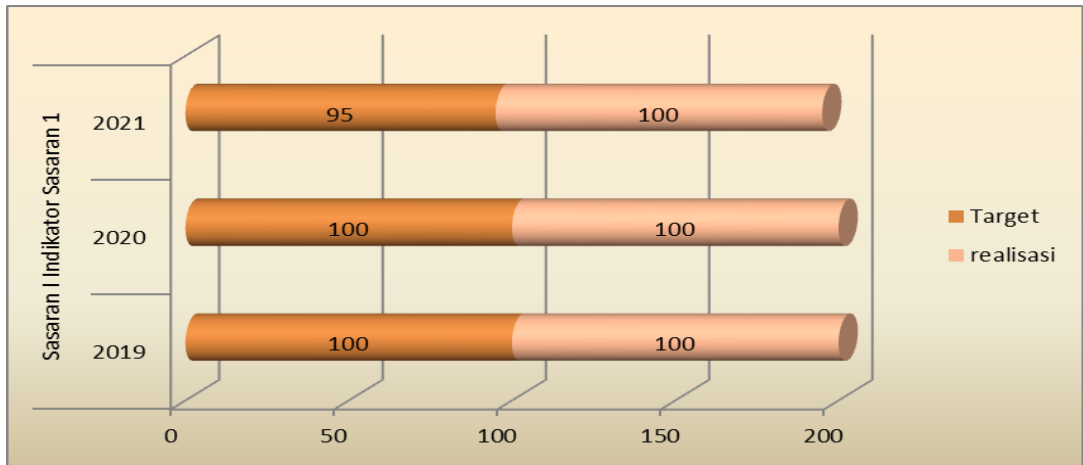
Untuk Tahun 2021 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Yang Konsisten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, target sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 105,26%. dan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan Untuk Pencapaian Pembangunan, target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 117,85%, dan serta pada sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target sebesar 75 % dengan

realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 133,33%.

Dari Indikator Tahun 2019 sampai dengan 2021 pada tabel III.5 dapat dijelaskan perbandingan capaian sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah selang waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 capaian masing-masing pertahun tercapai sesuai target yang diperjanjikan, hal ini disebabkan target keselarasan program pada RPJMD Kota Kotamobagu sesuai dengan program RKPD Kota Kotamobagu yang diformalkan/disahkan.
2. Untuk Indikator Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 tercapai sesuai target yang diperjanjikan, hal ini disebabkan karena pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dimanfaatkan sesuai target. Dan untuk Tahun 2020 tidak tercapai sesuai target yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan belum dimanfaatkan secara keseluruhan sesuai target.
3. Untuk Indikator Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 tercapai sesuai target yang diperjanjikan, hal ini disebabkan karena Jumlah Inovasi yang direncanakan telah ditindaklanjuti oleh OPD sesuai target. Dan untuk Tahun 2020 tidak tercapai sesuai target yang diperjanjikan hal ini dikarenakan Jumlah Inovasi yang direncanakan belum ditindaklanjuti oleh OPD secara keseluruhan sesuai target.

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan
Tahun 2019



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target akhir Renstra dapat di jelaskan pada tabel berikut :

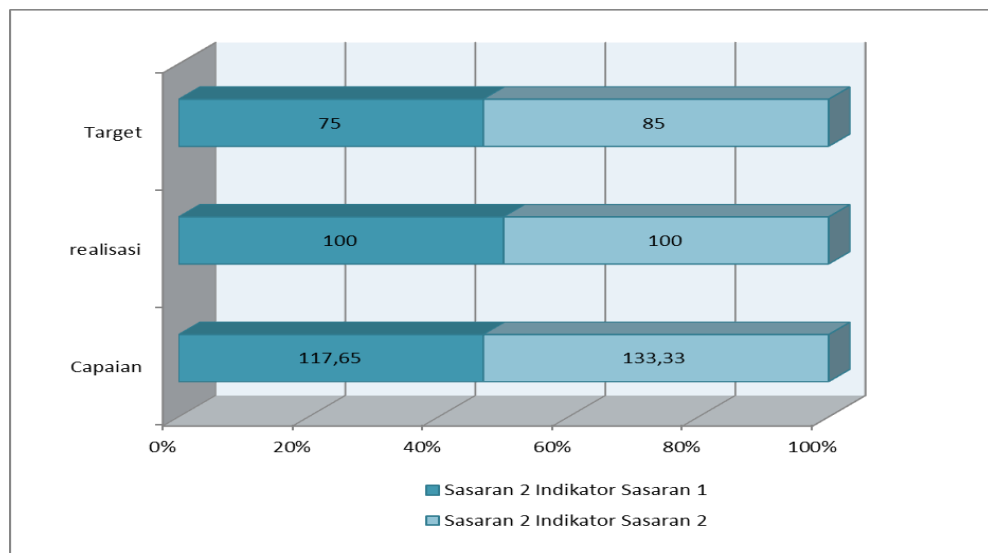
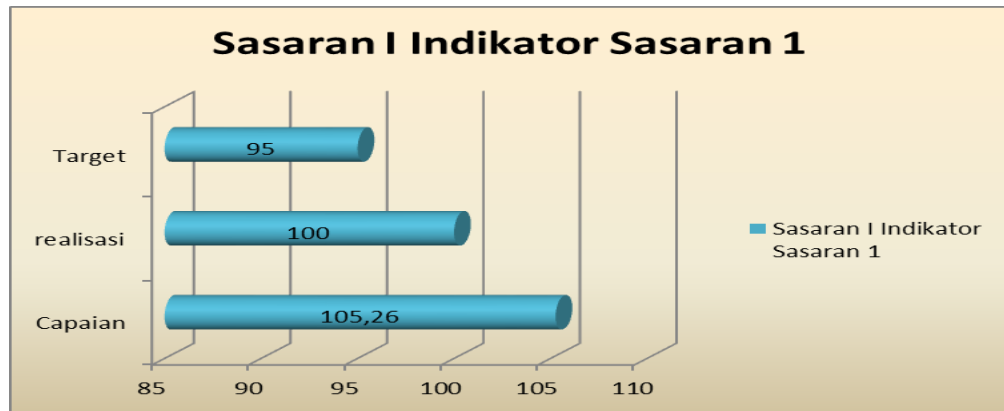
Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir
Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
			REALISASI	TAHUN 2023	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	100,00	95	105,26%
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbang untuk pencapaian pembangunan	100,00	85	117,65%
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100,00	75	133,33%

Pada Tabel III.6 di atas Pencapaian Tahun 2021 terhadap target akhir Renstra 2023 sebagaimana dalam Renstra tercapai yaitu capaian lebih dari 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh Bappelitbangda Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendampingan dan evaluasi kepada OPD untuk mencegah ketidakselarasan program.
2. Melakukan koordinasi Perangkat Daerah dan *Stakeholder* untuk memperhatikan konsistensi dalam melakukan kajian dan rumusan kebijakan.
3. Melakukan koordinasi Perangkat Daerah dan *Stakeholder* untuk memperhatikan konsistensi dalam melakukan kajian dan rumusan kebijakan.

Gambar 3.5
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir
Renstra



3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat dianalisis sebagai berikut :

A. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada Tahun 2021 indikator Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat yaitu program pada RPJMD telah sesuai dengan Program RKPD, dengan realisasi 105,26% atau tercapai.

1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini :
 - a. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan ini adalah tersedianya dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Rensta OPD setiap tahunnya, RKPD Tahun 2021, RKPD Perubahan Tahun 2021 program OPD telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2023 sehingga program RKPD adalah program yang ditetapkan pada RPJMD. Tersedianya sistem aplikasi *E-Planning* yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan serta dikoordinir oleh SIPD untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
 - b. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi sasaran pada rancangan RPJMD dan RKPD saat *draft* RPJMD masih berupa rancangan. Hal ini dapat diketahui jika terjadi ketidakselarasan.

Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Adanya program yang tidak direncanakan namun harus dilaksanakan karena amanat Pemerintah Pusat atau Propinsi.
- b. Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan OPD.

B. Sasaran kedua adalah Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada Tahun 2021 didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan Untuk Pencapaian Pembangunan dan Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi 100 % atau tercapai.

1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini :

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan ini adalah koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *Stakeholder* untuk menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan *Stakeholder* untuk memperhatikan konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif sehingga dapat diterapkan dengan baik serta hasilnya benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah dengan kondisi lapangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan senantiasa memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			Indikator	Anggaran	SD M	Indikator	Anggaran	SD M	Indikator	Anggaran	SD M
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95%	4.916.030.385	24 org	100	4.760.166.204	24 org	105,26%	96,83%	100%
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbang untuk pencapaian pembangunan	85%	277.612.000	3 org	100	269.290.066	3 org	117,65%	97,00%	100%
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	75%	155.775.800	2 org	100	151.264.200	2 org	133,33%	97,10%	100%

Sumber Data : SIPD dan Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kotamobagu Tahun 2021

Pada tabel diatas analisis efisiensi sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah dilaksanakan melalui program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah tercapai, dilihat dari capaian indikator kinerja sebesar 105,26% lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran 96,83% atau rasio efisiensi 3,17%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja, walaupun kegiatan tersebut terdapat efisiensi pada Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Panitia Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II tidak bayarkan. Dengan adanya efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik sehingga mendukung capaian indikator sasaran. Untuk mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada dibidang Perencanaan dan Pengendalian, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya Ekonomi, Alam Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sekretariat.

2. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah tercapai, dilihat dari capaian indikator kinerja sebesar 117,65% lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran 97,00% atau rasio efisiensi 3,00%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja, walaupun kegiatan tersebut terdapat efisiensi pada Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II tidak bayarkan. Dengan adanya efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik sehingga mendukung capaian indikator sasaran. Untuk

mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Sekretariat.

3. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah tercapai, dilihat dari capaian indikator kinerja sebesar 133,33% lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran 97,10% atau rasio efisiensi 2,90%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja, walaupun kegiatan tersebut terdapat efisiensi pada Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II tidak bayarkan. Dengan adanya efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik sehingga mendukung capaian indikator sasaran. Untuk mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Sekretariat.

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan di Bappelitbangda Kota Kotamobagu secara umum telah menunjang pencapaian indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada **Lampiran Tabel III.8** (Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja). Dengan penjelasan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Pencapaian Kinerja dengan indikator Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah didukung dengan kegiatan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
2. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut :

1. Dukungan terhadap pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan.
 2. Jumlah kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
 3. Jumlah rekomendasi Rencana Kerja Perangkat daerah.
 4. Jumlah rekomendasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
 5. Jumlah Rekomendasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Pencapaian kinerja dengan indikator Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu nilai kategori Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Hasil dari kegiatan diatas yaitu nilai kategori indeks inovasi daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

3. Pencapaian kinerja dengan indikator Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah didukung dengan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Persentase Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021 pagu anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu sebesar Rp.5.349.418.179,00 dan dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp.5.180.720.470,00 sehingga capaiannya sebesar 96,85% untuk rincian anggaran per program / kegiatan / sub kegiatan dapat dijelaskan dalam **Lampiran Tabel III.9** (Alokasi dan realisasi anggaran belanja operasional dan belanja modal Tahun Anggaran 2021). Dengan uraian belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar **Rp.3.164.954.358,-**, hingga 31 Desember 2021 realisasi sebesar **Rp.3.124.286.462,-**, atau sebesar 98,72%. Belanja Tidak Langsung di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 dialokasikan sesuai rincian pada objek Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar **Rp.1.896.161.875,-** dengan realisasi **Rp.1.876.563.985,-** atau sebesar 98,96%; dan pada objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar **Rp.1.268.792.483,-** dengan realisasi **Rp.1.247.722.477,-** atau sebesar 98,33%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar **Rp.2.184.463.821,-** hingga 31 Desember 2021 dicapai realisasi sebesar **Rp.2.056.434.008,-** atau sebesar 94,14%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian tujuan instansi.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran, sebagian besar target kinerja sudah tercapai. Pencapaian kinerja Tahun 2021 merupakan Tahun Ketiga yang ingin diwujudkan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Kinerja dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan rata – rata 118,75% dari total capaian kinerja Tahun 2021. Adapun hasil capaian kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Berdasarkan penetapan target Tahun 2021 dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi target.
2. Pada Tahun 2021 Bappelitbangda Kota Kotamobagu melakukan perubahan Renstra Tahun 2019-2023 sehingga IKU bisa terlaksana sesuai target.

Capaian kinerja selama Tahun 2021 didukung dengan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan yang baik.

2. Mengoptimalkan hasil kinerja melalui pemantauan dan koordinasi yang baik dengan *Stakeholder* dan OPD.
3. Peningkatan kapabilitas ASN melalui diklat pengembangan ASN untuk meningkatkan kemampuan ASN.

Dalam pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilaksanakan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada program dan kegiatan akibat terdampak Pandemi Covid-19.
2. Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dilaksanakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan.

Dalam mengatasi permasalahan diatas, beberapa solusi yang telah ditempuh oleh Bappelitbangda Kota Kotamobagu yaitu berkoordinasi dengan seluruh OPD serta memberi motivasi kepada OPD dan *Stakeholder* untuk melaksanakan dan memanfaatkan Sistem Inovasi Daerah dengan segala keterbatasan anggaran akibat Pandemi Covid-19.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah.


Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum tercapai maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah-langkah yang konkrit untuk pencapaian kinerja. Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain.

1. Konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dicapai sesuai dengan prioritas;
2. Menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang

bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada;

3. Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kelitbangan melalui kegiatan Pembinaan Kelitbangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan senantiasa memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

Demikian LKjIP Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2021. Laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, namun setidaknya dapat dijadikan gambaran untuk melihat kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu di Tahun 2021. Akhirnya kami berharap LKjIP ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



**LAMPIRAN-
LAMPIRAN**

Tabel III.8

Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keseluruhan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	%	100	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Publik	2	kali	2 kali

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
															Jumlah Pelaksanaan FGD	2	kali	2 kali
														Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	kali	2 kali
														Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	2	kali	2 kali
														Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang	2	kali	2 kali

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95 %		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Kosistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	%	100	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen RKPD	2	dokumen	2 dokumen
															Jumlah Dokumen RPJMD	1	dokumen	1 dokumen

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	%	100	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksann Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	kegiatan	1 kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Usulan Kegiatan Dan Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah	3	laporan	3 laporan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	%	100	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksann ya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	kegiatan	1 kegiatan	Jumlah Laporan Usulan Kegiatan Dan Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah		1	Laporan	1 laporan
SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Persentase Keselaran	95	%	100	Program Perencanaan,	Penjabaran Konsistensi	100	%	100	Kegiatan Koordinasi Perencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi	4	kegiatan	4 kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Jumlah Dokumen Penanggung	1	dokumen	1 dokumen

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
n yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah			Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	program RPJMD ke dalam RKPD				an Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia				dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ngan Kemiskinan Daerah			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keseluruhan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%	100	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	4	kegiatan	4 kegiatan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Jumlah Laporan SDG'S	1	dokumen	1 dokumen

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan	1	dokumen	1 dokumen

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang terselesaikan	100	%	100	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9	1	kegiatan	1 kegiatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	laporan	1 laporan

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang terselesaikan	100	%	100	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya alam	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	1	kegiatan	1 kegiatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	1	laporan	1 laporan

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI		
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	95	%	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang terselesaikan	100	%	100	100	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1	kegiatan	1	kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1	Laporan	1 laporan
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelibangaan untuk Pencapaian Pembangunan	85	%	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	50	%	50	Penelitian Dan Pengembangan Bid. Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Persentase kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian dan peraturan	100	%	100	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	1	Dokumen	1 Dokumen	

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKTOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALIASASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALIASASI	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	85	%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	50	%	50	Penelitian Dan Pengembangan Bid. Ekonomi dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang Ekonomi dan pembangunan	100	%	100	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	1 Dokumen	
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	75	%	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	50	%	50	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi	75	%	61	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi	42	inovasi	19 Inovasi

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	75	%	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	50	%	50	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi	75	%	61	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen rumusan kebijakan Inovasi Daerah	1	dokumen	1 dokumen

Lampiran Tabel III.9

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	Capaian (%)
1	TOTAL BELANJA LANGSUNG	5.349.418.179,00	5.180.720.470,00	168.697.709,00	96,85
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.888.989.079,00	3.799.587.425,00	89.401.654,00	97,70
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.164.954.358,00</i>	<i>3.124.286.462,00</i>	<i>40.667.896,00</i>	<i>98,72</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.164.954.358,00	3.124.286.462,00	40.667.896,00	98,72
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>471.521.821,00</i>	<i>459.013.892,00</i>	<i>12.507.929,00</i>	<i>97,35</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.041.271,00	115.322.142,00	11.719.129,00	90,78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.073.550,00	28.425.800,00	647.750,00	97,77
	Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	6.007.000,00	5.875.000,00	132.000,00	97,80
	fasilitas Kunjungan Tamu	33.480.000,00	33.480.000,00	-	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.920.000,00	275.910.950,00	9.050,00	100,00

NO	SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	Capaian (%)
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	146.562.900,00	139.615.648,00	6.947.252,00	95,26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.962.900,00	64.015.648,00	6.947.252,00	90,21
	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.950.000,00	76.671.423,00	29.278.577,00	72,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.730.000,00	38.331.783,00	21.398.217,00	64,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.220.000,00	38.339.640,00	2.880.360,00	93,01
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	530.211.500,00	468.842.629,00	61.368.871,00	88,43
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	410.268.000,00	359.605.829,00	50.662.171,00	87,65

NO	SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	Capaian (%)
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	15.050.000,00	14.975.000,00	75.000,00	99,50
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	101.712.000,00	95.355.959,00	6.356.041,00	93,75
	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	277.356.000,00	233.124.870,00	44.231.130,00	84,05
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	119.943.500,00	109.236.800,00	10.706.700,00	91,07
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	119.943.500,00	109.236.800,00	10.706.700,00	91,07
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	496.829.800,00	491.736.150,00	5.093.650,00	98,97

NO	SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	%
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	226.084.000,00	225.191.050,00	892.950,00	99,61
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.558.000,00	84.216.300,00	341.700,00	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.108.000,00	70.023.350,00	84.650,00	99,88
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.418.000,00	70.951.400,00	466.600,00	99,35
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	138.012.800,00	135.266.600,00	2.746.200,00	98,01

NO	SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)	(%)
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah				
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	433.387.800,00	420.554.266,00	12.833.534,00	97,04
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	98.734.400,00	90.856.500,00	7.877.900,00	92,02
	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	98.734.400,00	90.856.500,00	7.877.900,00	92,02
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	178.877.600,00	178.433.566,00	444.034,00	99,75
	penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	178.877.600,00	178.433.566,00	444.034,00	99,75
	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	155.775.800,00	151.264.200,00	4.511.600,00	97,10
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	155.775.800,00	151.264.200,00	4.511.600,00	97,10
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	0	-	-